



**PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBINAAN KELEMBAGAAN
BUMDES DI DESA SUNGAI BULUH KECAMATAN SINGINGI HILIR
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

SKRIPSI



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

SYUKRAN TAUBY
11575100879

**PROGRAM S.1
JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2020**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBINAAN KELEMBAGAAN
BUMDES DI DESA SUNGAI BULUH KECAMATAN SINGINGI HILIR
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian Oral Comprehensive Strata
1 Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif
Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

SYUKRAN TAUBY

11575100879

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM S.1
JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2020**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



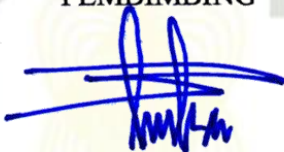
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : SYUKRAN TAUBY
 NIM : 11575100879
 JURUSAN : ADMINISTRASI NEGARA
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 JUDUL SKRIPSI : PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBINAAN KELEMBAGAAN BUMDES DI DESA SUNGAI BULUH KECAMATAN SINGINGI HILIR KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

DISETUJUI :

PEMBIMBING



Muammar Alkadafi, S.Sos., M.Si
 NIK. 130 712 075

MENGETAHUI:

DEKAN

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

KETUA JURUSAN

ADMINISTRASI NEGARA



Dr. Drs. H. Muhsin Said HM, M.Ag., MM
 NIP. 19620512 196903 1 003

Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si
 NIP. 19790101 200710 1 003



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMABARAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Syukran Tauby
 NIM : 11575100879
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Jurusan : Administrasi Negara
 Judul : Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pembinaan
 Kelembagaan BUMDes di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir
 Kabupaten Kuantan Singingi
 Tanggal Ujian : 21 Juli 2020

Disetujui Oleh
KETUA PENGUJI


Dr. Kamaruddin, S.Sos., M.Si
NIP. 19790101 200710 1 003

Mengetahui,

Penguji I


Dr. Jhon Afrizal, S.H., MA
NIP. 19790911 201101 1 003

Penguji II


Irdyanti, S.IP., MA
NIK. 130 411 030

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBINAAN KELEMBAGAAN BUMDES DI DESA SUNGAI BULUH KECAMATAN SINGINGI HILIR KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

SYUKRAN TAUBY

11575100879

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peranan pemerintah daerah melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi dalam pembinaan kelembagaan BUMDes di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi dan untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan kelembagaan BUMDes di Desa Sungai Buluh Kabupaten Kuantan Singingi. Konsep operasional dalam penelitian ini menggunakan buku Sukasmanto Tahun 2014. Adapun indikatornya adalah permodalan, pendampingan, dan pelatihan dan pengembangan. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif (Sugiyono). Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi, dokumentasi, dan teknik penentuan informan untuk mendapatkan hasil penelitian. Adapun yang menjadi subjek ataupun informan penelitian ini sebanyak 7 orang meliputi kepala bidang pemberdayaan masyarakat, tenaga ahli pemberdayaan, kepala desa, direktur BUMDes, pegawai BUMDes, dan masyarakat pemanfaat BUMDes. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa adanya peranan pemerintah daerah dalam pembinaan kelembagaan BUMDes di Kabupaten Kuantan Singingi melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa yaitu mampu merealisasikan pembinaan yang efektif dan optimal, adapun faktor-faktor penghambat dalam melaksanakan pembinaan kelembagaan BUMDes adalah hak rekognisi dan hak subsidiaritas.

Kata Kunci : Permodalan, Pendampingan, Pelatihan dan pengembangan.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil'aalamiin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBINAAN KELEMBAGAAN BUMDES DI DESA SUNGAI BULUH KECAMATAN SINGINGI HILIR KABUPATEN KUANTAN SINGINGI”**.

Yang merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana sosial pada Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan untuk baginda Rasulullah SAW.

Penulis menyadari bahwa sejak awal selesainya penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dorongan, motivasi, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Ayahanda Darwin dan Ibunda Ramayana yang telah mendidik, merawat dan membesarkan dengan penuh kasih sayang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta selalu mendo'akan keberhasilan dan keselamatan agar syukran kelak menjadi anak yang sukses dan bisa dibanggakan.

2. Bapak Rektor UIN Suska Riau, Prof. Dr. KH. Akhmad Mujahidin, M.Ag. beserta jajaran yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Drs. H. Muh.Said HM, M.Ag, MM. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial beserta jajaran yang telah mempermudah proses penyelesaian tugas akhir ini.
4. Ketua Jurusan Administrasi Negara Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si beserta staf Jurusan Administrasi Negara yang turut membantu penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Muammar Alkadafi, S.Sos, M.Si selaku pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan arahan, bimbingan, perhatian dan saran-saran kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.
6. Bapak dan Ibu Dosen UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah mendidik dan mengajarkan ilmu-ilmunya, sehingga apa yang belum diketahui oleh penulis sebelumnya menjadi tau. Semua ilmu yang diberikan sangat berguna dan bermanfaat untuk kesuksesan penulis di masa akan datang.
7. Seluruh Staf Akademik dan Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang turut membantu penulis dalam mengurus surat-surat untuk keperluan penulis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Kepala Perpustakaan UIN Sultan Syarif Kasim Riau beserta Pegawainya yang telah memberikan kemudahan kepada penulis untuk mendapatkan buku-buku sebagai referensi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Untuk abang tersayang Yunus Okda Rambli, SE., dan adik tercinta Surya Nanda terima kasih untuk motivasi, dukungan serta memberikan masukan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Untuk Sarjana muda Nursolehat, SH. yang selalu memberikan motivasi, do'a, dukungan, dan kesabaran dalam hal mengingatkan tanpa henti dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan juga terima kasih karna telah menjadi seseorang yang bisa dijadikan adek, keluarga serta someone special my future.
11. Sahabat Muharramah Akbar, S.Sos., Romi Yan Permana, S.Sos., Muhammad Ramli, Muhammad Ilham, Heru Gunawan, S.Pt. dan senior yang cukup terhormat Mutria Zenda, S.Sos. yang membantu, menemani, dan memberikan semangat untuk penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
12. Teman-teman seperjuangan, terutama Administrasi Negara E 2015, terima kasih atas dukungan serta pengalaman yang hebat selama diperkuliahan.

Besar harapan semoga Allah Swt menerima segala amal ibadah mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang lebih dan semoga skripsi ini bermanfaat serta dapat menambah ilmu pengetahuan bagi setiap kalangan, Amiin.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akhir kata, penulis memahami bahwasanya tak ada di dunia ini yang sempurna, tak terkecuali skripsi ini. Dengan segenap kerendahan hati, penulis mengharapkan saran yang membangun demi penyempurnaan skripsi ini, Terima Kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 12 Maret 2020

Penulis

Syukran Tauby
NIM. 11575100879

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	15
1.3 Tujuan Penelitian	15
1.4 Manfaat Penelitian	16
1.5 Sistematika Penulisan	16
BAB II : LANDASAN TEORI.....	18
2.1 Kebijakan Publik.....	18
2.2 Peranan.....	19
2.3 Pemerintah Daerah.....	21
2.4 Pembinaan.....	22
2.5 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	23
2.6 Pendampingan.....	26



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.7	Pemberdayaan	27
2.8	Penelitian Terdahulu	28
2.9	Pandangan Islam	30
2.10	Konsep Operasional	33
2.11	Kerangka Pemikiran	33
BAB III : METODE PENELITIAN		35
3.1	Lokasi Penelitian.....	35
3.2	Jenis Penelitian	35
3.3	Sumber Data	35
3.4	Informan Penelitian.....	36
3.5	Metode Pengumpulan Data.....	37
3.6	Analisis Data.....	38
BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN		40
4.1	Sejarah Singkat Kabupaten Kuantan Singingi.....	40
4.2	Profil Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	43
4.2.1	Visi Dan Misi Dinas Sosiaal Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	44
4.2.2	Susunan Organisasi.....	45
4.2.3	Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	47

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.3 Struktur Organisasi Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	51
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
5.1 Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pembinaan Kelembagaan BUMDes di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.....	52
5.1.1 Permodalan	57
5.1.2 Pendampingan BUMDes	61
5.1.3 Pelatihan dan Pengembangan	74
5.2 Faktor Pendukung Dan Penghambatan Pemerintah Daerah Dalam Pembinaan Kelembagaan BUMDes Di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi	87
BAB VI : PENUTUP.....	92
6.1 Kesimpulan.....	92
6.2 Saran	95

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

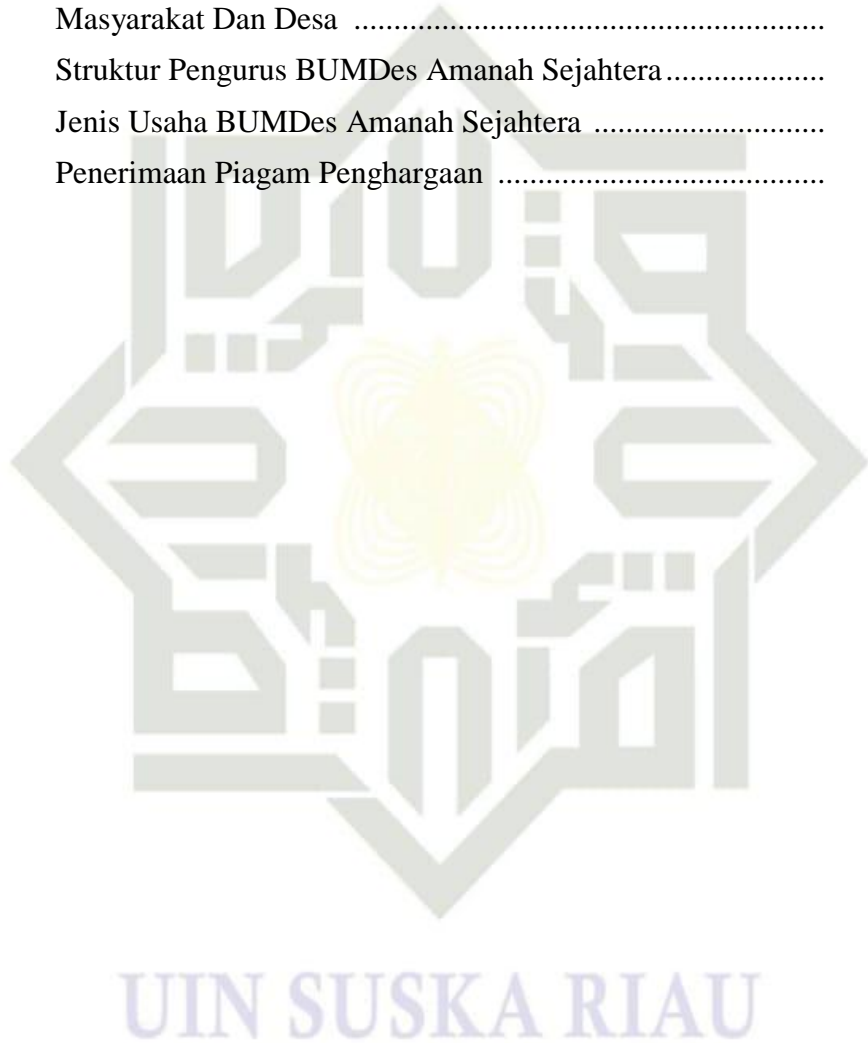
TABEL 1.1	Jumlah Penduduk Kabupaten Kuantan Singingi	2
TABEL 1.2	Jumlah BUMDes di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016	9
TABEL 1.3	Jumlah BUMDes di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017	10
TABEL 1.4	Jumlah BUMDes di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018	11
TABEL 1.5	Jumlah BUMDes di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019.....	12
TABEL 1.6	BUMDes yang Berhasil	13
TABEL 1.7	BUMDes yang Gagal	14
TABEL 2.1	Penelitian Terdahulu	28
TABEL 2.2	Konsep Operasional	33
TABEL 3.1	Informan Penelitian.....	37
TABEL 4.1	Data Jumlah Penduduk dan Kelurahan/Desa per Kecamatan	42
TABEL 5.1	Data Pengurus BUMDes Amanah Sejahtera	76
TABEL 5.2	Keuntungan/Laba BUMDes Tahun 2018-2019	81
TABEL 5.3	Omset Usaha BUMDes	81
TABEL 5.4	Pembagian Laba BUMDes Amanah Sejahtera	82
TABEL 5.5	Bantuan Dana Sosial SHU BUMDes Amanah Sejahtera Tahun 2019.....	83

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran	34
Gambar 4.1	Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	51
Gambar 5.1	Struktur Pengurus BUMDes Amanah Sejahtera	68
Gambar 5.2	Jenis Usaha BUMDes Amanah Sejahtera	80
Gambar 5.3	Penerimaan Piagam Penghargaan	85



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah daerah merupakan pihak yang menjalankan roda perekonomian, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang dituntut untuk dapat melaksanakan pemerintahan secara transparan dan bertanggungjawab terhadap pengelolaan keuangan agar tercipta pemerintahan yang bersih. Pemerintah daerah diatur berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagai penyempurna dari Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa pemerintahan daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pada era otonomi ini membuat daerah-daerah yang ada di Indonesia berlomba-lomba untuk menjadi daerah yang terbaik diantara daerah-daerah yang lainnya karena ini menjadi peluang besar bagi daerah untuk memajukan dan mengembangkan daerahnya sendiri untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakat dan pegawainya. Demi tercapainya wacana daerah untuk memajukan dan mengembangkan daerahnya, maka daerah harus mengatur strategi dalam menjalankan pemerintahannya untuk dapat dimaksimalkan guna mendukung

peningkatan kehidupan yang lebih baik, baik itu dalam bidang ekonomi, sosial, maupun politik.

Berikut adalah data jumlah penduduk di Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Kecamatan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi :

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Kuantan Singingi

No.	KECAMATAN	PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LK DAN PR
1.	BENAI	8.176	8.218	16.394
2.	CERENTI	7.840	7.660	15.500
3.	GUNUNG TOAR	7.066	6.947	14.013
4.	INUMAN	7.939	7.924	15.863
5.	HULU KUANTAN	4.488	4.290	8.778
6.	KUANTAN HILIR	7.677	7.539	15.216
7.	KUANTAN HILIR SEBERANG	6.720	6.694	13.414
8.	KUANTAN MUDIK	12.365	12.551	24.916
9.	KUANTAN TENGAH	24.896	23.978	48.874
10.	LOGAS TANAH DARAT	11.138	10.448	21.586
11.	PANGEAN	9.402	9.582	18.984
12.	PUCUK RANTAU	5.788	4.907	10.695
13.	SENTAJO RAYA	15.027	14.517	29.544
14.	SINGINGI	16.775	15.723	32.498

15.	SINGINGI HILIR	20.453	18.579	39.032
TOTAL		165.750	159.557	325.307

Sumber : Badan Pusat Statistik (2017)

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Kuantan Singingi terdapat 317.890 jiwa dengan jumlah laki-laki sebanyak 163.168 jiwa dan jumlah perempuan sebanyak 154.722 jiwa.

BUMDes Sangat berperan penting terhadap kehidupan masyarakat didesa, dalam menghasilkan sumber pendapatan bagi desa tersebut. Salah satu strategi dalam memudahkan desa untuk mendapatkan sumber pendapatan desa adalah dibuatnya kebijakan oleh pemerintah yang mengatur hal tersebut, yang tertera dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dalam pasal 213, bahwa pemerintah desa juga dianjurkan untuk memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berguna untuk mengatur perekonomian desa dan memenuhi kebutuhan serta menggali potensi desa. Undang-undang ini merupakan salah satu upaya dari pemerintah pusat dalam meningkatkan peran desa untuk ikut berkecimpung dan ikut serta dalam meningkatkan perekonomian desa. Pendirian BUMDes juga didasari oleh UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 87 ayat 1 yang berbunyi, “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes” dan ayat 2 berbunyi “BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan” dan ayat 3 yang berbunyi “BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Hal ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Di samping itu, agar tidak berkembang sistem usaha kapitalistis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.

Dalam jurnal Dian Apriyanti, Kiki Endah, Budi Setiadi (2019:263), Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) merupakan salah satu lembaga ekonomi yang dibangun berdasarkan inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Dalam mengelola dan menjalankan Usaha Badan Milik Desa banyak pihak dari mulai pemerintah desa, pengurus BUM Desa belum memahami mengenai tujuan, prinsip BUM Desa itu sendiri, sehingga hal tersebut mengakibatkan BUM Desa tidak berjalan dengan optimal. Mengingat hal tersebut maka setiap BUM Desa hendak mendapatkan pembinaan dari pihak-pihak terkait.

Pendekatan yang diharapkan mampu menstimulasi dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan adalah melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Lembaga ekonomi ini tidak lagi didirikan atas dasar instruksi pemerintah, tetapi harus didasarkan pada keinginan masyarakat desa yang berangkat dari adanya potensi yang jika dikelola dengan tepat akan menimbulkan permintaan di pasar. Lembaga ekonomi ini agar

keberadaannya tidak dikuasai oleh kelompok tertentu yang memiliki modal besar di pedesaan, maka kepemilikan lembaga itu oleh desa dan dikontrol bersama dimana tujuan utamanya untuk meningkatkan standar hidup ekonomi masyarakat.

Pendirian BUMDes dimaksudkan untuk mengurangi peran para yang seringkali menyebabkan meningkatnya biaya transaksi antara harga produk dari produsen kepada konsumen akhir. Melalui lembaga ini diharapkan setiap produsen di pedesaan dapat menikmati selisih harga jual produk dengan biaya produksi yang layak dan konsumen tidak harus menanggung harga pembelian yang mahal. BUMDes membantu kebutuhan dana masyarakat yang bersifat konsumtif dan produktif, menjadi distributor utama untuk memenuhi kebutuhan sembilan bahan pokok (sembako) dan berfungsi menumbuhkan suburkan kegiatan pelaku ekonomi di perdesaan.

Pemerintah bertujuan mendirikan BUMDes untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, desa merupakan agen pemerintah terdepan yang dapat menjangkau kelompok sasaran riil yang hendak disejahterakan, yaitu dengan membentuk suatu badan usaha yaitu Badan Usaha Milik Desa yang sesuai dengan pemerintah dalam negeri nomor 39 tahun 2010 tentang badan usaha milik desa, yang menyebutkan bahwa, “Untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat pedesaan, didirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa” sebagaimana yang dijelaskan dalam jurnal Titin Lestari (JOM FISIP. Vol. 4 No. 1, 2017:1-2).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendirian BUMDes tersebut harus disertai dengan upaya penguatan kapasitas dan didukung oleh kebijakan (kabupaten/kota) yang memfasilitasi dan melindungi usaha ini dari ancaman persaingan para pemodal besar. Mengingat badan usaha ini merupakan lembaga ekonomi baru yang beroperasi di pedesaan dan masih membutuhkan landasan yang kuat untuk tumbuh dan berkembang. Selain dilakukannya pendirian BUMDes yang bertujuan meningkatkan pendapatan asli desa dan perekonomian masyarakat desa, tentunya dibutuhkan keahlian dalam mengelola BUMDes, hal tersebut tentunya akan terwujud apabila dilakukan pembinaan BUMDes oleh pemerintah daerah. Selain masyarakat dan pemerintah desa, pemerintah daerah juga ikut serta dalam mengelola BUMDes baik itu dalam hal, permodalan, pelatihan, dan pengembangan. Dalam jurnal Eka Nurcahya (Vol. 2 No. 1 Mei 2019: 2) BUMDes sejatinya sebagai lembaga sosial yang berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya sebagai penyedia pelayanan sosial. Namun BUMDes juga sebagai lembaga komersial dimana BUMDes bertujuan untuk mencari keuntungan melalui penjualan barang atau jasa yang diperuntukan kepada masyarakat.

Pembinaan merupakan hal yang penting baik itu dalam pendirian maupun pengelolaan. Pembinaan ini dilakukan agar tercapainya tujuan yang diinginkan dalam pendirian maupun pengelolaan BUMDes agar usaha tersebut dapat berkembang di dalam hal perekonomian sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat beserta Pendapatan Asli Desa (PADes). Dengan hal tersebut akan terwujudnya BUMDes yang efektif dan efisien sehingga bisa menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BUMDes dalam operasionalnya ditopang oleh lembaga moneter desa (unit pembiayaan) sebagai unit yang melakukan transaksi keuangan berupa kredit maupun simpanan. Jika kelembagaan ekonomi kuat dan ditopang kebijakan yang memadai, pertumbuhan ekonomi yang disertai pemerataan distribusi aset kepada rakyat secara luas akan mampu menanggulangi berbagai permasalahan ekonomi di pedesaan. Tujuan akhirnya, BUMDes sebagai instrumen merupakan modal sosial (*social capital*) yang diharapkan mampu menjembatani upaya penguatan ekonomi di pedesaan.

Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan pembinaan peningkatan usaha agar bisa memanfaatkan potensi asli desa dan kebutuhan pasar ke dalam suatu perencanaan, di samping itu perlu memperhatikan potensi lokalistik serta dukungan kebijakan (*good will*) dari pemerintahan di atasnya untuk mengatasi rendahnya surplus kegiatan ekonomi desa disebabkan kemungkinan tidak berkembangnya sektor ekonomi di wilayah pedesaan. Hal ini akan mengakibatkan terjadinya integrasi sistem dan struktur pertanian dalam arti luas, usaha perdagangan, dan jasa yang terpadu akan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam tata kelola lembaga.

Keberadaan BUMDes di era otonomi daerah pada awalnya tertuang dalam Pasal 107 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah era otonom dinyatakan bahwa sumber pendapatan desa salah satunya adalah pendapatan asli desa yang meliputi :

- 1) Hasil usaha desa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Hasil kekayaan desa
- 3) Hasil swadaya dan partisipasi
- 4) Hasil gotong royong
- 5) Lain-lain pendapatan asli desa yang sah.

Penjelasan Pasal 107 ayat (1) menyebutkan bahwa pemberdayaan potensi desa dalam meningkatkan pendapatan desa dilakukan antara lain, dengan pendirian Badan Usaha Milik Desa, kerja sama dengan pihak ketiga dan kewenangan melakukan pinjaman.

Pemikiran pendirian BUMDes didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, BUMDes dibangun atas prakarsa (inisiatif) masyarakat serta mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif, dan transparansi. Selain itu pengelolaan BUMDes harus dilakukan secara profesional dan mandiri. BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial. BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar.

Adapun data jumlah BUMDes yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi mulai dari tahun 2016-2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2 Jumlah BUMDes di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016

No	Kecamatan	Desa	Nama BUMDes	Perdes
1	Singingi Hilir	Sungai Buluh	Amanah Sejahtera	No. 5 Tahun 2015
2	Singingi Hilir	Simpang Raya	Bina Rakyat	No. 3 Tahun 2015
3	Singingi Hilir	Muara Bahan	Bina Karya	No. 9 Tahun 2016
4	Singingi Hilir	Sumber Jaya	Berkat Yakin	No. 3 Tahun 2016
5	Singingi Hilir	Suka Damai	Makarti Jaya	No. 6 Tahun 2016
6	Singingi	Sungai Sirih	Sejahtera	No. 2 Tahun 2015
7	Singingi	Pasir Mas	Singamas	No. 10 Tahun 2015
8	Singingi	Sungai Keranji	Harapan Mandiri	No. 4 Tahun 2016
9	Sentajo Raya	Langsat Hulu	Gemilang	No. 3 Tahun 2016
10	Sentajo Raya	Kampung Baru Sentajo	Al-Kautsar	No. 4 Tahun 2016
11	Sentajo Raya	Muara Sentajo	Murdas	No. 2 Tahun 2016
12	Kuantan Tengah	Jake	Jaya Karya	No. 3 Tahun 2016
13	Kuantan Mudik	Bukit Pedusunan	Danau Indah	No. 8 Tahun 2016
14	Logas Tanah Darat	Sako Magasari	Bintang Muda Jaya	No. 10 Tahun 2016
15	Kuantan Hilir	Gunung Melintang	Gunung Melintang Perkasa	No. 6 Tahun 2016

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwasanya jumlah BUMDes di Kabupaten Kuantan Singingi yang telah di resmikan Oleh Bupati pada tahun 2016 berjumlah 15 desa memiliki BUMDes yang terdapat dalam 7 kecamatan.

Tabel 1.3 Jumlah BUMDes di Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2017

No	Kecamatan	Desa	Nama BUMDes	Perdes
1	Hulu Kuantan	Mudik Ulo	Tunas Harapan	No. 3 Tahun 2016
2	Hulu Kuantan	Lubuk Ambacang	Ngarai Tangongan	No. 6 Tahun 2017
3	Kuantan Mudik	Pantai	Bina Harapan	No. 5 Tahun 2017
4	Singingi Hilir	Sukamaju	Maju Jaya Sejahtera	No.11 Tahun 2016
5	Singingi Hilir	Beringin Jaya	Mekar Jaya	No. 6 Tahun 2016
6	Singingi Hilir	Bukit Raya	Nuju Makmur	No. 4 Tahun 2017
7	Singingi	Petai Baru	Cahaya	No. 1 Tahun 2017
8	Logas Tanah Darat	Giri Sako	Anugerah Jaya	No. 3 Tahun 2017
9	Logas Tanah Darat	Hulu Teso	Mekar Lestari	No. 3 Tahun 2016
10	Sentajo Raya	Geringging Jaya	Bima Jaya	No. 4 Tahun 2017

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwasanya jumlah BUMDes yang telah di resmikan oleh Bupati Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2017 menurun dibandingkan dengan tahun 2016 yaitu sebanyak 10 desa memiliki BUMDes yang

terdapat dalam 6 kecamatan. Tetapi dari tahun 2016, desa yang ada di Kecamatan Singingi Hilir selalu antusias dalam membuat BUMDes terutama desa transmigrasi yang ada di Kecamatan Singingi Hilir. Bahkan pada tahun 2017 sudah semua desa transmigrasi yang ada di Kecamatan Singingi Hilir telah memiliki BUMDes.

Tabel 1.4 Jumlah BUMDes di Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2018

No	Kecamatan	Desa	Nama BUMDes	Perdes
1	Benai	Tebing Tinggi	Harapan Makmur	No. 4 Tahun 2017
2	Kuantan Tengah	Beringin Taluk	Bertasbih	No. 5 Tahun 2017
3	Logas Tanah Darat	Teratak Rendah	Andester	No. 7 Tahun 2017
4	Kuantan Tengah	Pulau Banjar kari	Mitra Banjar jaya	No. 3 Tahun 2018
5	Benai	Pulau Lancang	Satu hati	No. 5 Tahun 2018
6	Benai	Tanjung Simandolak	Seroja	No. 6 Tahun 2018
7	Kuantan Mudik	Lubuk Ramo	Ramo Jaya	No. 5 Tahun 2018
8	Kuantan Mudik	Rantau Sialang	Haraoan Sentosa	No. 2 Tahun 2018
9	Singingi	Sungai Kuning	Madani	No. 6 Tahun 2017
10	Singingi	Air Emas	Bina Desa	No. 4 Tahun 2018
11	Sentajo Raya	Seberang Teratak Air Hitam	Kembang Seribu	No. 4 Tahun 2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12	Sentajo Raya	Marsawah	Seroja	No. 4 Tahun 2018
13	Sentajo Raya	Muara Langsung	Berkah Abadi	No. 4 Tahun 2018
14	Sentajo Raya	Geringging Baru	Geringging Mulia	No. 5 Tahun 2018
15	Sentajo Raya	Koto Sentajo	Sumber Berkah	No. 4 Tahun 2018

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwasanya jumlah BUMDes pada tahun 2018 yang telah di resmikan oleh Bupati Kabupaten Kuantan Singingi sebanyak 15 desa dari 7 kecamatan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi.

Tabel 1.5 Jumlah BUMDes di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019

No	Kecamatan	Desa	Nama BUMDes	Perdes
1	Kuantan Tengah	Kopah	Metador	No 03 Tahun 2017
2	Kuantan Tengah	Pulau Aro	Inayan Permai	No 04 Tahun 2018
3	Kuantan Tengah	Sitorajo Kari	Mandiri Jaya	No 03 Tahun 2018
4	Singingi Hilir	Tanjung Pauh	Tanjung Pauh Berlian	No 04 Tahun 2018
5	Logas Tanah Darat	Sukaraja	Berkah Makmur	No 07 Tahun 2018
6	Benai	Talontam	Sinar Talontam	No 04 Tahun 2018
7	Benai	Gunung Kesiangan	Berkah Mandiri	No 04 Tahun 2018
8	Cerenti	Tanjung Medan	TJM Mandiri	No 06 Tahun 2018
9	Seberang Cengar	Kuantan Mudik	Cengar Jaya Abadi	No 03 Tahun 2019
10	Pebaun Hilir	Kuantan Mudik	Maju Bersama	No 07 Tahun 2019

Sumber : Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dilihat pada tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat 7 kecamatan yang telah mendirikan BUMDes. Ada 10 BUMDes yang didirikan dan diresmikan oleh Bupati Kuantan Singingi pada tanggal 15 Februari 2019.

Adapun desa yang telah berhasil dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi adalah :

Tabel 1.6 BUMDes yang berhasil

No	Kecamatan	Desa	Nama BUMDes	Perdes
1	Singingi Hilir	Sungai Buluh	Amanah Sejahtera	No. 5 Tahun 2015
2	Singingi Hilir	Simpang Raya	Bina Rakyat	No. 3 Tahun 2015
3	Kuantan Mudik	Bukit Pedusunan	Danau Indah	No. 8 Tahun 2016
4	Singingi	Sungai Sirih	Sejahtera	No. 2 Tahun 2015
5	Kuantan Mudik	Bukit Pedusunan	Danau Indah	No. 8 Tahun 2016
6	Hulu Kuantan	Lubuk Ambacang	Ngarai Tangongan	No. 6 Tahun 2017
7	Singingi	Sungai Keranji	Harapan Mandiri	No. 4 Tahun 2016
8	Sentajo Raya	Geringging Jaya	Bima Jaya	No. 4 Tahun 2017
9	Singingi Hilir	Beringin Jaya	Mekar Jaya	No. 6 Tahun 2016

Sumber : Koordinator Kabupaten

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwasanya jumlah desa yang telah berhasil mengelola BUMDes sebanyak 9 desa dari 6 kecamatan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi.

Adapun desa yang gagal dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi sebagai berikut :

Tabel 1.7 Jumlah BUMDes yang gagal

No	Kecamatan	Desa	Nama BUMDes	Perdes
1	Singingi	Pasir Mas	Singamas	No. 10 Tahun 2015
2	Logas Tanah Darat	Sako Magasari	Bintang Muda Jaya	No. 10 Tahun 2016
3	Kuantan Tengah	Jake	Jaya Karya	No. 3 Tahun 2016
4	Kuantan Mudik	Pantai	Bina Harapan	No. 5 Tahun 2017

Sumber : Koordinator Kabupaten

Dalam pembinaan BUMDes di Kabupaten Kuantan Singingi, Pemerintah harus lebih meningkatkan hal tersebut agar tidak ada BUMDes yang gagal dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa maupun mengelola potensi asli desa. Pembinaan BUMDes di Kabupaten Kuantan Singingi merupakan tugas dari pemerintah melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa.

Melihat fenomena tersebut, maka inilah yang akan diteliti lebih lanjut mengenai pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi kepada BUMDes yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi. Penulis

tertarik mengkaji lebih lanjut apakah sudah maksimal pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul **“Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembinaan Kelembagaan BUMDes di Kabupaten Kuantan Singingi”**.

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang diangkat adalah :

1. Bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam pembinaan kelembagaan BUMDes di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi ?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat Pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan kelembagaan BUMDes di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembinaan Kelembagaan BUMDes di Kabupaten Kuantan Singingi, adalah :

1. Untuk menganalisis peranan Pemerintah Daerah dalam pembinaan kelembagaan BUMDes di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat Pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan kelembagaan BUMDes di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

1.4 Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan nantinya bisa menjadi bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis yang ingin meneliti hal di bidang yang sama.
2. Bagi penulis sendiri penelitian ini berguna untuk dapat mengembangkan dan meningkatkan kemampuan dalam berfikir dan melatih penulis dalam menerapkan ilmu yang telah dipelajari selama perkuliahan.

1.5 Sistematika Penulisan

Karena adanya keterbatasan waktu, tenaga, biaya, dan luasnya ruang lingkup penelitian maka peneliti hanya meneliti di Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini menguraikan tentang teori-teori yang berhubungan dengan masalah penelitian yang akan di teliti berupa definisi konsep, konsep operasional, penelitian terdahulu, dan kerangka berpikir.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan tentang waktu dan lokasi penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini penulis akan mengemukakan gambaran umum tentang objek yang akan diteliti.

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasan yang akan diteliti.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dari penelitian dan saran agar dapat membangun bagi objek penelitian dan bisa lebih baik kedepannya dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dari pembaca.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kebijakan Publik

Kebijakan publik menurut Thomas R Dye sebagaimana dikutip Islamy (2009:19) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “*is whatever goverment choose to do or not to do*” (apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan). Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan “tindakan” dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semat. Di samping itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh (dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu).

Menurut David Easton sebagaimana dikutip Leo Agustino (2009:19) memberikan definisi kebijakan publik sebagai “*the autorative allocation of values for the whole society*”. Definisi ini menegaskan bahwa hanya pemilik otoritas dalam sistem politik (pemerintah) yang secara sah dapat berbuat sesuatu pada masyarakat dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu diwujudkan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai. Hal ini disebabkan karena pemerintah termasuk ke dalam “*authorities in a political system*” yaitu para penguasa dalam sistem politik yang terlibat dalam urusan sistem politik sehari-hari dan mempunyai tanggungjawab dalam suatu masalah tertentu dimana pada suatu titik mereka diminta untuk mengambil keputusan di

kemudian hari kelak diterima serta mengikat sebagian besar anggota masyarakat selama waktu tertentu.

2.2 Peranan

Peranan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa atau bagian yang dimainkan seseorang dalam suatu peristiwa. (KBBI, 1996:751)

Menurut Soejono Soekamto, peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan, karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya (Soekamto, 2009:212).

Peranan menurut Gros, Mason, dan M.C Eachern mengatakan bahwa karangan David Berry adalah perangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu atau kelompok yang menempati kedudukan sosial tertentu. Hal senada juga diungkapkan oleh David Berry, menurutnya di dalam peranan terdapat dua macam harapan yaitu :

1. Harapan-harapan dari masyarakat terdapat pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran.
2. Harapan-harapan yang dimiliki oleh si pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan peranannya atau kewajibannya (Berry, 1995:101)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan, keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lainnya dan begitu pula sebaliknya. Tidak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan, sebagaimana halnya dengan kedudukan, peranan juga memiliki dua arti, setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola hidupnya. Hal itu berarti sekaligus bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

Pentingnya peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang, peranan menyebabkan seseorang pada batasan-batasan tertentu, dapat meramalkan perbedaan-perbedaan orang lain. Orang yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang sekelompoknya, hubungan antara peranan-peranan individu dalam masyarakat.

Seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan yang mempengaruhi lingkungannya. Menurut Soekamto (Soekamto, 2009:213) peranan mencakup tiga hal yaitu:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Di dalam interaksi sosial kadang kala kurang disadari bahwa yang paling penting adalah melaksanakan peranan. Tidak jarang terjadi bahwa dianggap proses interaksi tersebut kedudukan lebih dipentingkan sehingga terjadi hubungan-hubungan yang timpang tersebut lebih cenderung mementingkan bahwa satu pihak mempunyai hak saja sedangkan pihak lain hanyalah mempunyai kewajiban belaka.

2.3 Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPR menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Pemerintah daerah provinsi terdiri dari pemerintah daerah provinsi dan DPRD provinsi. Sedangkan pemerintah daerah kabupaten/kota terdiri dari pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah (UU No. 32 Tahun 2004).

Menurut Ni'matul Huda, pemerintahan daerah adalah suatu pemerintahan otonom dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ni'matul Huda, 2005:20).

Sedangkan menurut Siswanto, sistem pemerintahan di Indonesia meliputi (Siswanto Sunarno, 2005:5) :

1. Pemerintahan pusat
2. Pemerintahan daerah, yang meliputi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota
3. Pemerintahan desa.

2.4 Pembinaan

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberikan pengertian pembinaan sebagai berikut:

1. Pembinaan merupakan proses, pembuatan, cara membina
2. Pembinaan diartikan sebagai pembaharuan, penyempurnaan
3. Pembinaan adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya dan berhasil guna untuk mendapatkan hasil yang baik (W.J.S. Poerwadarminta, 1966:50).

Menurut Miftah Thoha (2008:207) pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan yang lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang atau peningkatan atas sesuatu. Ada dua unsur dari definisi pembinaan yaitu:

1. Pembinaan itu bisa berupa suatu tindakan, proses atau pernyataan tujuan
2. Pembinaan bisa menunjukkan kepada perbaikan atas sesuatu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Mathis (2002:112) pembinaan adalah suatu proses dimana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, proses ini terkait dengan berbagai tujuan organisasi, pembinaan dapat dipandang secara sempit maupun luas. Pembinaan berorientasi ke masa sekarang dan membantu pegawai untuk menguasai keterampilan dan kemampuan (kompetensi) yang spesifik untuk berhasil dalam pekerjaannya. Pembinaan dapat diartikan sebagai segala usaha dan kegiatan mengenai perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, penyusunan program, koordinasi, pelaksanaan, dan berhasil guna untuk mencapai tujuan dengan hasil semaksimal mungkin.

2.5 BUMDes

Menurut Handayati (dalam Rohman, Abdul. Ferina, Ika S. dan Ermadiani 2018:382) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Menurut Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, BUMDes didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes). Sebagai lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Disamping itu, supaya tidak berkembang sistem usaha kapitalistis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Organisasi ekonomi perdesaan menjadi bagian penting sekaligus masih menjadi titik lemah dalam rangka mendukung penguatan ekonomi perdesaan. Oleh karenanya diperlukan upaya sistematis untuk mendorong organisasi ini agar mampu mengelola aset ekonomi strategis di desa sekaligus mengembangkan jaringan ekonomi demi meningkatkan daya saing ekonomi perdesaan. Dalam konteks demikian, BUMDes pada dasarnya merupakan bentuk konsolidasi atau penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa.

BUMDes dibangun atas prakarsa (inisiasi) masyarakat, serta mendasarkan pada prinsip-prinsip *kooperatif, partisipatif, akuntable, transparansi, emansipatif*, dan *sustainable* dengan mekanisme *member-base* dan *self-help*. Dengan demikian kelembagaan pengelola BUMDes harus dilakukan secara profesional dan mandiri.

BUMDes menurut Abdul R, Ika SF, dan Ermadiani (2018:381) merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial.

BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan untuk mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar. Dalam menjalankan usahanya prinsip efisiensi dan efektifitas harus selalu ditekankan. BUMDes sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa.

BUMDes merupakan instrumen pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam bentuk sesuai dengan karakteristik lokal, potensi, dan sumberdaya yang dimiliki masing-masing desa. Ragam bentuk pendayagunaan lokal ini

bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga desa melalui pengembangan usaha ekonomi mereka. Disamping itu, keberadaan BUMDes juga memberikan sumbangan bagi peningkatan sumber Pendapatan Asli Desa (PADes) yang memungkinkan desa mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara optimal. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga umumnya. Menurut Abdul R, Ika SF, dan Ermadiani (2018:382) ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi lainnya antara lain:

1. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama
2. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil)
3. Operasionalnya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal
4. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar
5. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa
6. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes
7. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, anggota).

Permodalan BUMDes dapat berasal dari pemerintah desa, tabungan masyarakat, bantuan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, pinjaman, atau penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hasil atas dasar saling menguntungkan. BUMDes dapat melakukan pinjaman sesuai dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Ini sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, PDTT No 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Pasal 18 ayat 1 dan 2. Penjelasan ini sangat penting untuk mempersiapkan pendirian BUMDes, karena implikasinya akan bersentuhan dengan pengaturannya dalam Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Desa (Perdes).

2.6 Pendampingan

Menurut Suharto (2005:93) Pendampingan sebagai suatu strategi yang umum digunakan oleh pemerintah dan lembaga nonprofit dalam upaya meningkatkan mutu dan kualitas dari sumber daya manusia, sehingga mampu mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari permasalahan yang dialami dan berupaya untuk mencari alternative pemecahan masalah yang dihadapi. Kemampuan sumber daya manusia sangat dipengaruhi oleh keberdayaan dirinya sendiri. Oleh karena itu sangat dibutuhkan kegiatan pemberdayaan di setiap kegiatan pendampingan. Pendampingan merupakan suatu strategi yang sangat menentukan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat.

Adapun menurut Direktorat Bantuan Sosial (2007:4), pendampingan adalah sesuatu proses pemberian kemudahan (fasilitas) yang diberikan pendamping kepada klien dalam mengidentifikasi kebutuhan dan memecahkan masalah serta mendorong tumbuhnya inisiatif dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kemandirian klien secara berkelanjutan dapat diwujudkan. Sedangkan menurut Permendes PDTT No. 3 Tahun 2015 pada ketentuan umum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pasal 1 ayat 14, pendampingan desa adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitas desa. Pendamping desa bertugas mendampingi desa dalam penyelenggaraan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Berdasarkan tugasnya, pendamping desa terbagi dalam tiga kategori yaitu :

1. Tenaga pendamping profesional
2. Kader pemberdayaan masyarakat desa
3. Pihak ketiga

2.7 Pemberdayaan

Menurut UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 12 bahwa pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Pemberdayaan masyarakat pada prinsipnya yaitu menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat desa. Meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat desa melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan.

Peraturan pelaksanaan UU Desa yaitu PP No 43 tahun 2014 pasal 128 - 131 dengan sub paragraf Pendampingan Masyarakat Desa menyebutkan bahwa

Tugas pendampingan menjadi tugas dari jenjang pemerintah di semua level, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi hingga pemerintah kabupaten (pasal 128 ayat 1). Namun pendampingan langsung / pendampingan teknis hanya menjadi tugas SKPD kabupaten sebagai wilayah otonom terdekat dengan desa (pasal 128 ayat 2). Camat sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah kabupaten, bertugas mengkoordinasikan pendampingan masyarakat desa di wilayah kerjanya (pasal 128 ayat 3).

2.8 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian (Tahun)	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Titin Lestari	Peran pemerintahan desa terhadap pembangunan perekonomian melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mitra Usaha Mulya di Desa Marga Mulya Kecamatan Rambah Samo Kabupaten	Bagaimana peran pemerintahan desa terhadap pembangunan perekonomian melalui BUMDes Mitra Jaya di Desa Marga Mulya Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu?	Dalam pengembangan ekonomi desa, peran pemerintah desa sangat dominan dalam pembentukan dan pengembangan BUMDes dan pemerintah desa dapat bertanggungjawab setiap jabatan	Adapun yang menjadi perbedaan dengan penelitian terdahulu antara lain, penelitian ini mengkaji tentang peran pemerintahan desa terhadap pembangunan perekonomian melalui

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Rokan Hulu (Skripsi, Universitas Riau, 2015)		masing-masing dan faktor yang menjadi penghambat dalam upaya pembangunan perekonomian Desa Marga Mulya melalui BUMDes di Kabupaten Rokan Hulu yaitu, penataan kelembagaan desa yang belum maksimal dan kurangnya responsivitas pemerintah desa untuk menjadikan BUMDes sebagai program unggulan.	BUMDes Mitra Mulya, sedangkan penelitian saya tentang peranan pemerintah daerah dalam pembinaan kelembagaan BUMDes.
Agus Sobar	Peranan pemerintah daerah dalam pembinaan pengembangan koperasi di	Bagaimana peran pemerintah daerah dalam pembinaan pengembangan	Pemerintah Kota Sukabumi pada setiap tahunnya memiliki kebijakan pembinaan	Adapun yang menjadi perbedaan dengan penelitian terdahulu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Kota Sukabumi (skripsi, STIE PGRI Sukabumi, 2017)	koperasi di Kota Sukabumi?	pengembangan koperasi dalam bentuk kegiatan-kegiatan fasilitas promosi pengembangan prodk, fasilitas pengembangan jaringan usaha, pengembangan permodalan, penerapan teknologi, dan pendidikan pelatihan SDM. Pemerintah Kota Sukabumi mampu mendukung perkembangan koperasi lebih baik, aktif dan prospektif.	antara lain, penelitian ini mengkaji tentang peranan pemerintah daerah dalam pembinaan pengembangan koperasi, sedangkan penelitian saya peranan pemerintahan daerah dalam pembinaan kelembagaan BUMDes.
--	---	----------------------------	--	---

2.9 Pandangan Islam

Islam adalah agama yang sangat sempurna ajarannya, tidak hanya membahas tentang aqidah saja namun lebih daripada itu. Semua yang ada di dunia maupun di akhirat diajarkan semua di dalam islam. Sebagai agama universal,

yang berisikan ajaran tidak pernah lekang oleh waktu, atau lapuk oleh zaman dengan basisnya Al-Quran, Islam sudah mengajarkan kepada umatnya bahwa kinerja harus dinilai sehingga dapat mencapai sebuah tujuan.

Menurut ilmu ekonomi islam, pemerintahan mempunyai peran penting dalam perekonomian. Para ulama dan pakar ekonomi islam sepanjang sejarah telah membahas peran penting pemerintah dalam perekonomian. Menurut para ulama dalam ekonomi islam, pemerintah memiliki kekuasaan yang paling luas untuk melaksanakan peran penting tersebut dengan syarat bahwa hal itu dilaksanakan dengan cara demokrasi dan adil, dimana segala keputusan diambil sesudah bermusyawarah secukupnya dengan wakil-wakil rakyat yang sebenarnya.

Meskipun Islam memberikan peran kepada pemerintah peran kepada pemerintah secara luas, hal itu tidak berarti bahwa konsep ekonomi islam mengabaikan kemerdekaan individu. Betapa pentingnya peran pemimpin untuk mengatur segala urusan yang dipimpinnya, dalam hadits sahih Muslim no. 3408 sudah sangat jelas mengenai pertanggungjawaban seorang muslim yaitu :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا كُفُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ عَلَيْهِمْ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ (رواه بخاري ومسلم)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : “Diriwayatkan dari Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Abdullah bin Dinar dari Abdullah bin Uma r.a berkata : saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda: setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang istri yang memelihara rumah tangga suaminya akan ditanya perihal tanggungjawab dan tugasnya. Bahkan seorang pembantu/pekerja rumah tangga yang bertugas memelihara barang milik majikannya juga akan ditanya perihal yang dipimpinnya. Dan kamu sekalian pemimpin dan akan ditanya (diminta pertanggungjawaban) dari hal-hal yang dipimpinnya. (HR. Bukhari dan Muslim).

Berdasarkan hadits diatas, jelaslah bahwasanya Allah SWT akan mencatat semua perbuatan yang dilakukan hamba-Nya dan diminta pertanggungjawaban kelak di akhirat nanti, apalagi dia sudah ditunjuk sebagai pemimpin untuk bertanggungjawab untuk semuanya. Oleh sebab itu dibutuhkan kebijakan dari pemerintah untuk menumbuhkembangkan kelembagaan perekonomian mikro. Salah satu strategi yang diambil oleh pemerintah adalah membuat kelembagaan BUMDes.

2.10 Konsep Operasional

Variabel	Indikator	Sub-indikator
Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pembinaan Kelembagaan BUMDes di Kabupaten Kuantan Singingi	Permodalan	1. Penyertaan dana modal dari pemerintah kepada BUMDes 2. Memberikan bantuan sarana dan prasarana
	Pendampingan BUMDes	1. Pembantu BUMDes 2. Melakukan peningkatan produk usaha BUMDes di pasar 3. Melakukan pengorganisasian di dalam BUMDes
	Pelatihan dan Pengembangan	1. Meningkatkan kinerja SDM 2. Melakukan pelatihan studi kelayakan usaha dan manajemen usaha

Sumber : Rancang Bangun Bisnis dan Pengelolaan BUM Desa (Sukasanto ; 2014)

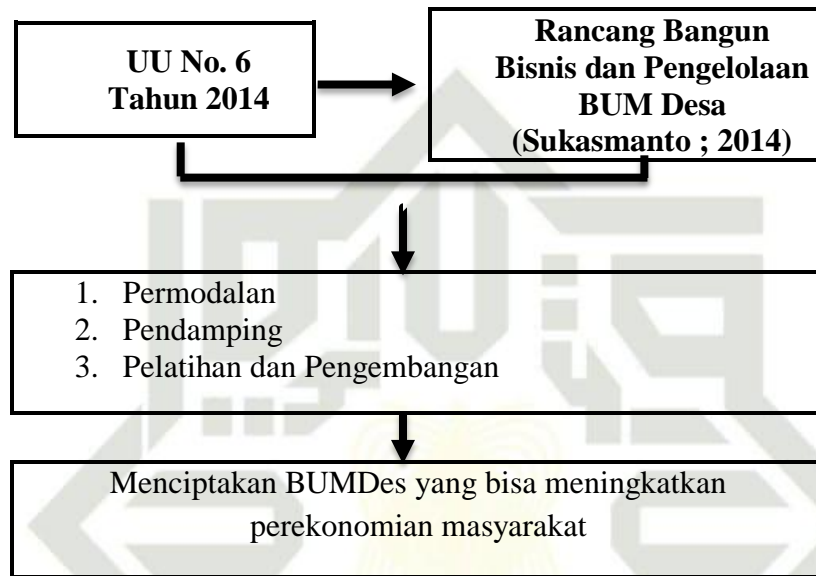
2.11 Kerangka Pemikiran

Uma Sekaran dalam Sugiono (2007:65) mengemukakan bahwa kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka pemikiran bertujuan untuk memberikan gambaran lebih jelas tentang variabel penelitian dan indikator-indikator yang menentukannya. Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di kantor Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang bertempat di Kabupaten Kuantan Singingi. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan karena Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berada dibawah naungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai pusat pembinaan dan pemusatan pelatihan bagi anggota BUMDes di Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei tahun 2019.

3.2 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kuantitatif yaitu jenis penelitian yang menggambarkan suatu keadaan atau penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau hubungan antara variabel yang satu dengan yang lain (Sugiyono, 2005:11). Penelitian kualitatif digunakan peneliti untuk menjelaskan gambaran-gambaran mengenai fakta-fakta yang ada di dalam pembinaan BUMDes. Penelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskan peranan pemerintah daerah dalam pembinaan BUMDes.

3.3 Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Data primer yaitu data utama yang diperoleh langsung dari responden penelitian di lapangan mencakup data hasil tanggapan responden terhadap peran pemerintah daerah dalam pembinaan kelembagaan BUMDes yang didapatkan melalui angket maupun wawancara.
2. Data sekunder yaitu data pelengkap yang diperoleh dari pihak kedua guna melengkapi penelitian ini meliputi peraturan-peraturan mengenai peran pemerintah daerah dalam pembinaan BUMDes di Kabupaten Kuantan Singingi, serta kendala-kendala yang dihadapinya.

3.4 Informan Penelitian

Subjek dalam penelitian ini peneliti tentukan dengan metode *puposive sampling*. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2003:96) dengan menggunakan purposive sampling diharapkan kriteria sampel yang diperoleh benar-benar sesuai dengan penelitian yang dilakukan dan mampu menjelaskan keadaan yang sebenarnya tentang objek yang diteliti.

(Moleong, 2000:97) Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Adapun kriteria yang ingin peneliti jadikan sebagai informan adalah subjek ataupun individu yang peneliti anggap mampu dan mengetahui permasalahan yang akan diteliti dengan kriteria antara lain :

1. Berada di daerah yang akan diteliti
2. Mengetahui serta terlibat langsung dengan kejadian / permasalahan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dapat berargumentasi dengan baik
4. Merasakan dampak dari kejadian / permasalahan

Berikut ini merupakan tabel informan penelitian yang:

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No	Informan	Kategori
1.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat	1
2.	Seksi Pemberdayaan Ekonomi Desa	1
3.	Tenaga Ahli Pemberdayaan	1
4.	Direktur BUMDes	1
5.	Pegawai BUMDes	2
6.	Pendamping Desa	1

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan peneliti dalam rangka mengumpulkan data penelitian. Pengumpulan data dan informasi dalam penelitian ini menggunakan teknik-teknik sebagai berikut :

- a. Wawancara

Teknik ini merupakan suatu jenis pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan tanya jawab (*interview*) dengan informan yang diteliti untuk

mendapatkan data yang diperlukan. Untuk mempermudah dalam proses wawancara, peneliti membuat pedoman wawancara yang memuat garis-garis pokok pertanyaan dan apabila dianggap perlu, peneliti dapat mengajukan pertanyaan di luar pedoman *interview* tersebut, agar diperoleh data yang semakin lengkap. Penentuan informan dilakukan dengan seleksi yang didasarkan pada kriteria tertentu.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, rapat dan sebagainya. Adapun dokumentasi dalam penelitian ini, berupa foto-foto mengenai wawancara dan yang lainnya.

3.6 Analisis Data

Untuk mengetahui peran pemerintah daerah dalam pembinaan kelembagaan BUMDes di Kabupaten Kuantan Singingi, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif yang dikemukakan oleh Sugiyono. Berikut ini adalah beberapa tahapan yang dipakai untuk menganalisis data :

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Data yang sudah direduksi memberikan gambaran data yang tepat dan dapat membantu penulis dalam pengumpulan data. Data yang diperoleh dari wawancara dan observasi akan difokuskan pada peran pemerintah daerah dalam pembinaan kelembagaan BUMDes di Kabupaten Kuantan Singingi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat deskriptif. Informasi yang didapat di lapangan disajikan dalam teks dengan sebaik mungkin tanpa adanya penambahan dari fakta yang ada. Hal tersebut bertujuan untuk dapat menyajikan data yang telah direduksi dengan tepat dan dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan.

3. Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir pengolahan data adalah penarikan kesimpulan. Setelah semua data tersaji permasalahan yang menjadi objek penelitian dapat dipahami dan kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Singkat Kabupaten Kuantan Singingi

Kabupaten Kuantan Singingi merupakan pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Pelalawan, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak, Natuna, Karimun, Kuantan Singingi dan Kota Batam. Dengan dibentuknya Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Indragiri Hulu dikurangi dengan sebagian wilayah Kabupaten Kuantan Singingi yang terdiri atas wilayah Kecamatan Singingi, Kecamatan Kuantan Hilir, Kecamatan Cerenti, Kecamatan Benai, Kecamatan Kuantan tengah, dan Kecamatan Kuantan Mudik.

Kabupaten Kuantan Singingi memiliki batas wilayah yang telah diatur didalam Undang-Undang No 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Pelalawan, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak, Natuna, Karimun, Kuantan Singingi dan Kota Batam sebagai berikut :

1. Sebelah utara dengan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, Kecamatan Pangkal Kuras dan Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan
2. Sebelah timur dengan Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu
3. Sebelah selatan dengan Propinsi Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Sebelah barat dengan Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar dan Propinsi Sumatra Barat.

Pada Tanggal 27 Juli 2012 Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi melakukan pemekaran 3 kecamatan baru yang diatur berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kuantan Singingi No. 24 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, Kecamatan Sentajo Raya, Dan Kecamatan Pucuk Rantau. Kecamatan baru yang merupakan pemekaran dari suatu kecamatan atau penggabungan dari pemekaran dua atau lebih bagian kecamatan yang bersanding yaitu:

1. Kecamatan Kuantan Mudik menjadi Kecamatan Pucuk Rantau dan Kecamatan Kuantan Mudik.
2. Kecamatan Kuantan Hilir menjadi Kuantan Hilir Seberang dan Kecamatan Kuantan Hilir.
3. Kecamatan Kuantan Tengah menjadi Kecamatan Kuantan Tengah dan Kecamatan Sentajo Raya.

Kabupaten Kuantan Singingi memiliki luas 7.665,06 km² berada pada posisi 0°00-1°00 lintang selatan 101°02-101°55 bujur Timur. Secara geografis, geokonomi berada di bagian selatan Propinsi Riau sehingga mempunyai peranan yang sangat strategis sebagai simpul perdagangan untuk menghubungkan daerah produksi dan pelabuhan, terutama pelabuhan Kuala Enok.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Pada umumnya beriklim tropis dan rata-rata curah hujan berkisar 229-1.133 per tahun yang di pengaruhi musim kemarau berkisar pada Maret sampai dengan Agustus dan musim hujan berkisar September sampai dengan Februari. Pada tahun 2018 jumlah penduduk Kabupaten Kuantan Singingi mencapai 330.996 jiwa yang tersebar di 15 kecamatan, 11 kelurahan, dan 218 desa dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.1 Data jumlah penduduk dan kelurahan/desa per kecamatan

NO	Kecamatan	Ibukota	Kelurahan/Desa	Luas wilayah (km ²)	Jumlah Penduduk (jiwa)
1.	Kuantan Mudik	Lubuk Jambi	24	564,28	25.041
2.	Hulu Kuantan	Lubuk Ambacang	12	384,40	9.040
3.	Gunung Toar	Kampung Baru	14	165,25	14.127
4.	Pucuk Rantau	Pangkalan	10	821,64	9.944
5.	Singingi	Muara Lembu	14	1.953,66	32.678
6.	Singing Hilir	Koto Baru	12	1.530,97	41.282
7.	Kuantan Tengah	Taluk Kuantan	23	270,74	50.188
8.	Sentajo Raya	Koto sentajo	15	145,70	30.431
9.	Benai	Benai	16	124,66	17.831
10.	Kuantan Hilir	Baserah	16	148,77	13.965
11.	Pangean	Pangean	17	145,32	19.478
12.	Logas Tanah Darat	Perhentian Luas	15	380,32	22.985
13.	Kuantan Hilir Seberang	Koto Rajo	14	114,29	11.297

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

14.	Cerenti	Cerenti	13	456,00	15.880
15.	Inuman	Inuman	14	450,01	16.799
Jumlah			229	7.656.03	330.966

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2018

4.2 Profil Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi berkedudukan dikomplek perkantoran Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. Kabupaten Kuantan Singingi di pimpin oleh seorang Bupati dan wakil Bupati yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretaris Daerah serta dinas/lembaga/badan yang terkait dalam menjalankan roda Pemerintah dan pembangunan yang menjadi kewenangan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Salah satu Dinas yang menjadi unsur pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yaitu Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini berdiri pada tahun 1999 yang awalnya bernama Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dengan beralamatkan Jalan Proklamasi Gang Perindustrian Sei. Jering Teluk Kuantan. Pada tahun 2006 terbit Peraturan Daerah tentang pembentukan susunan dimana dirubah menjadi Dinas Koperasi Perindustrian Dan Perdagangan yang Pindah ke alamat Jalan. Pattimura Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. Seiring berkembangnya Koperasi di Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2016 Pemerintah Daerah mengeluarkan kembali Peraturan baru menjadi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian.

4.2.1 Visi dan Misi Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- Visi

Sebagaimana telah dirumuskan bersama bahwa visi dari Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah “Terwujudnya efektivitas penanganan masalah kesejahteraan sosial dan bencana didukung oleh meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa”.

- Misi

Adapun misi dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kinerja aparatur dinas sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa
2. Membangun kemitraan dan kerjasama yang harmonis dengan lembaga sosial
3. Mengembangkan prakarsa dan peran aktif masyarakat dalam meningkatkan kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
4. Perwujudan masyarakat sosial dan lembaga sosial yang berkualitas dan bermartabat
5. Penanganan Bencana yang tanggap, Cepat dan Tepat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.2.2 Susunan Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 29 Tahun 2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi dan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 1 Desember 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dibidang Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa.

Struktur Organisasi adalah suatu kerangka dasar yang menunjukan dengan jelas hubungan antar bidang yang satu dengan bidang yang lain. Dalam struktur organisasi yang terpenting adalah tercapainya tujuan yang telah ditentukan berdasarkan kewenangan dan tanggung jawab pada masing-masing fungsional.

Struktur organisasinya adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum
 2. Sub Bagian Program
 3. Sub Bagian Keuangan
- c. Bidang Pemberdayaan Sosial

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Seksi pemberdayaan PMKS dan kelembagaan sosial
2. Seksi penanggulangan kemiskinan
3. Seksi pengembangan kesejahteraan sosial

d. Bidang Jaminan Sosial, Bencana, Rehabilitasi Sosial

1. Seksi perlindungan dan jaminan sosial
2. Seksi penanganan bencana
3. Seksi rehabilitasi sosial

e. Bidang Pemberdayaan Desa

1. Seksi penataan dan kerjasama desa
2. Seksi administrasi pemerintahan desa
3. Seksi keuangan aset desa

f. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

1. Seksi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan
2. Seksi pemberdayaan ekonomi desa
3. Seksi pemberdayaan lembaga dan masyarakat hukum adat

4.2.3 Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Kepala Dinas

Dinas Sosial Kabupaten Kuantan Singingi dipimpin oleh Kepala Dinas.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kuantan Singingi dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kepala dinas mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, merumuskan kebijakan teknis, melaksanakan, membina, mengawasi, mengendalikan dan monitoring, mengevaluasi dan pelaporan urusan pemerintah bidang Sosial, dan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

2. Bagian Sekretariat

Bagian sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris dan berada dibawah serta bertanggungjawab kepada kepala dinas. Bagian sekretariat mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan pengelolaan data, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan dari pengendalian serta evaluasi ketatausahaan, kepegawaian, sarana dan prasarana, penyelenggaraan rumah tangga, perjalanan dinas, kehumasan, keprotokolan, program dan keuangan.

3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Kepala bidang pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan perumusan, pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, memfasilitasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan palaporan bidang pemberdayaan masyarakat. Kepala bidang pemberdayaan masyarakat dalam melaksanakan tugas dibantu oleh kepala seksi yang terdiri dari Seksi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Seksi Pemberdayaan Ekonomi, Seksi Pemberdayaan Lembaga Dan Masyarakat Hukum Adat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Pemberdayaan Desa menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Desa
- b. Penyusunan rencana program dan anggaran di bidang Pemberdayaan Desa
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Desa
- d. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Desa
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Seksi Pemberdayaan Ekonomi Desa mempunyai tugas penyiapan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Desa.

Adapun uraian tugas **Seksi Pemberdayaan Ekonomi Desa** adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan inventarisasi data dan informasi pemberdayaan ekonomi desa
- b. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis dalam rangka pemberdayaan usaha ekonomi desa (UED-SP, BUMDes, SPP, pasar desa, pamsimas dan lembaga ekonomi mikro tingkat desa lainnya), pendayagunaan potensi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumber Daya Alam (SDA) desa dan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG)

- c. Melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan seksi pemberdayaan ekonomi desa berdasarkan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat.
- d. Melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria dan pedoman dalam rangka pemberdayaan usaha ekonomi desa, pendayagunaan potensi Sumber Daya Alam (SDA) desa dan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG)
- e. Melaksanakan pembinaan umum, bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka pemberdayaan usaha ekonomi desa, pendayagunaan potensi Sumber Daya Alam (SDA) desa dan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG)
- f. Melaksanakan fasilitas dan koordinasi dalam pemberdayaan usaha ekonomi desa, pendayagunaan potensi SDA desa dan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG)
- g. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengawasan dalam rangka pemberdayaan usaha ekonomi desa, pendayagunaan potensi Sumber Daya Alam (SDA) desa dan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG)
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa dibentuk dengan berdasarkan peraturan daerah (PERDA) kabupaten kuantan singingi nomor 4

tahun 2016 tentang susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang dikeluarkan pada tanggal 28 Desember 2016 yang mempunyai tugas kedudukan, tugas dan fungsi sebagai berikut :

a. Tugas

Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dibidang Sosial dan dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

b. Fungsi

Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa mempunyai fungsi melakukan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkungan bidang sosial dan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, melakukan pengawasan secara teknis pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan lingkungan tugasnya, melakukan pembinaan terhadap unit pelaksanaan teknis dinas dalam lingkup tugasnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

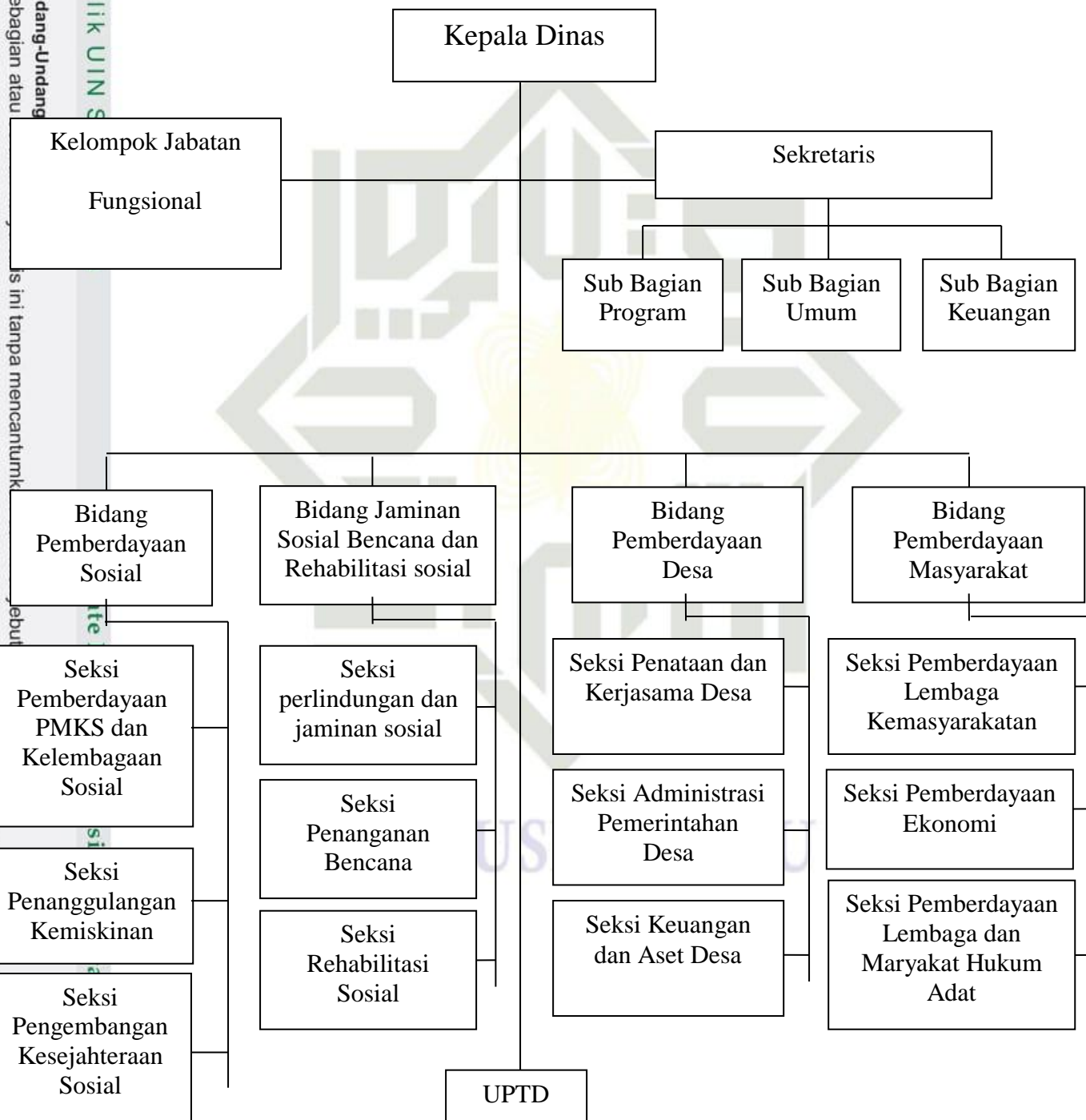
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.3 Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Gambar 4.1 Sturktur Organisasi



Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

BAB VI

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang telah peneliti lakukan mengenai Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pembinaan Kelembagaan BUMDes di Kabupaten Kuantan Singingi, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai pelengkap dan akan dikemukakan saran-saran sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal ini Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa di Kabupaten Kuantan Singingi.

1. Dalam melakukan peranan pemerintah daerah melalui Dinas Sosial PMD, melakukan pembinaan BUMDes salah satunya seperti sosialisasi pembentukan BUMDes, pembentukan usaha BUMDes itu sendiri, memberikan pengarahannya terhadap pemerintah desa maupun masyarakat itu sendiri. Adanya peranan pemerintah daerah melalui Dinas Sosial, PMD di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi yaitu mampu merealisasikan pembinaan yang efektif dan maksimal, dilihat dari 3 variabel yang dikemukakan oleh Sukasmanto yakni : Dari segi permodalan, Permodalan yang diberikan ataupun yang diterima tidak hanya berbentuk uang, tetapi juga berbentuk sarana dan prasarana seperti lahan, bangunan, dan barang produksi. Selain itu permodalan BUMDes Amanah Sejahtera juga berasal dari cadangan modal yang dialokasikan pada akhir tahun. pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi memberikan penyertaan modal dalam pembentukan awal UED-SP, dana

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

desa yang berasal dari APB Desa, dan dana bantuan dari provinsi (bankeu) yang langsung ditujukan untuk desa dan juga sarana prasana dari pemerintah, meskipun tidak mendapatkan modal dari dana desa ,bangunan dan lahan BUMDes merupakan bantuan dari pemerintah desa. Setelah itu, Dalam hal Pendampingan, pendamping desa di Kabupaten Kuantan Singingi belum masuk dalam kategori pendamping khusus BUMDes akan tetapi pendamping desa secara tidak langsung juga merangkap kepada BUMDes, sebab BUMDes bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) dan pendapatan masyarakat desa yang juga merupakan tupoksi dari pendamping desa itu sendiri. Sedangkan dalam melakukan pengorganisasian, pendamping juga membimbing BUMDes dalam melakukan pengorganisasian dan pembentukan struktur organisasi agar pegawai dapat memahami tugas pokok dan fungsinya. Kemudian, Dari segi pelatihan dan pengembangan, pemerintah daerah melakukan pelatihan yang berupa metode sekolah lapangan yang menggabungkan teori dan praktek secara langsung kepada pegawai BUMDes. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja SDM yang berkualitas dalam mengelola BUMDes Amanah Sejahtera yaitu dengan perlu mengetahui latar belakang pendidikan struktur pengurus/pengelola, dimana sebagian besar dari pengelolahnya merupakan tamatan SLTA.. Selain itu pemerintah juga melakukan pelatihan kelayakan usaha untuk mengetahui usaha yang dipilih oleh BUMDes layak atau tidak. Pelatihan Pelatihan yang diberikan oleh pemerintah yaitu berbentuk pengajaran kepada pengelola BUMDes

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan masyarakat untuk dapat memilih usaha yang sesuai dengan potensi desa dan kebutuhan masyarakat desa.

Terdapat faktor-faktor pendukung dan penghambat pemerintah daerah dalam melaksanakan pembinaan kelembagaan BUMDes di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun faktor pendukung keberhasilan BUMDes yaitu, intervensi pemerintah yaitu Program Pemberdayaan Desa mengalokasikan dana sebesar Rp 500.000.000,- dan menerjunkan tenaga pendamping desa atau fasilitator program untuk mendampingi transformasi implementasi program tersebut di Desa Sungai Buluh pada tahun 2018. Kemudian, Sumber Daya Alam (SDA) dimana Desa Sungai Buluh memiliki potensi tanah untuk perkebunan sawit dan karet yang jumlahnya 1.819,42 ha dan wilayah yang tidak rawan dengan bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dll. Selanjutnya Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu Pengelola BUMDes Amanah Sejahtera memiliki pengetahuan dan keahlian yang sudah memadai. Dan yang terakhir partisipasi masyarakat. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu, tidak adanya SOP, kurangnya perhatian pemerintah, dan masih terdapat masyarakat yang telat membayar di unit simpan pinjam. Dan faktor penghambat yang dialami oleh pemerintah adalah hak rekognisi dan hak subsidiaritas yang merupakan hak asal usul dan hak penetapan kewenangan desa dalam memanfaatkan, mendukung, mengurus, dan memperkuat ekonomi desa yang sudah ada untuk mencapai kesejahteraan masyarakat desa.

5.2 Saran

Adapun saran penulis mengenai Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pembinaan Kelembagaan BUMDes di Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut :

1. Kepada pemerintah daerah khususnya untuk dinas sosial pemberdayaan masyarakat dan desa agar dapat meningkatkan pembinaan lebih efektif dan efisien terhadap pengelola BUMDes sehingga pengelola dapat mendirikan usaha sesuai kebutuhan masyarakat desa yang bertujuan agar BUMDes di kabupaten kuantan singingi berjalan, dan berkembang dengan semsetinya.
2. Kepada pengelola BUMDes diharapkan dapat membuat SOP dan mampu mendirikan serta menjalankan usaha sesuai kebutuhan masyarakat desa yang bertujuan agar terciptanya peluang kerja bagi masyarakat dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya hal tersebut diharapkan pengelola mampu menjalankan tugasnya sesuai tupoksi dari jabatannya agar BUMDes dapat menciptakan desa yang mandiri dan sejahtera sesuai dengan visi dan misi Menteri Desa, PDTT.
3. Kepada seluruh elemen, baik itu pemerintah daerah, pemerintah desa, pengelola BUMDes, maupun masyarakat desa agar ikut serta dalam peningkatan dan menjaga fasilitas BUMDes yang didirikan demi mendukung kemajuan dan kemandirian desa-desa yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Berry, David. 1995. *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hadist Shahih Riwayat Bukhori Muslim*. Semarang: Pustaka As-Sunnah hadist
- Islamy, Irfan. 2009. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mathis, Robert. L dan Jackson, Jhon H. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Selemba Empat.
- Miftah Thoha. 2003. *Pembinaan Organisasi: Proses Diagnosa & Intervensi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Miftah Thoha. 2008. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Edisi Pertama Jakarta: Prenadamedia Group.
- Moelong, Lexy J. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhammad Idrus. 2007. *Metode Penelitian Ilmu-ilmu Sosial (Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif)*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Ni'Matul Huda. 2005. *Otonomi daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rohman, Abdul. Ferina, Ika S. dan Ermadiani. 2018. *Pengelolaan Administrasi Keuangan Pemerintah Desa*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Siswanto Sunarno. 2005. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soejono Soekamto. 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali pers.
- Sugiono. 2003. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2005. *Metode Penelitian Bisnis*. _____.: _____.
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat, Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung : PT. Refika Aditama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sukasmanto. 2014. *Rancangan Bangun Bisnis dan Pengelolaan BUM Desa*. Yogyakarta: FPPD

Wijaya, David. 2018. *BUM Desa (Badan Usaha Milik Desa)*. Yogyakarta: Gava Media.

W.J.S. Poerwadarminta. 1966. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Djakarta: Balai Pustaka.

Jurnal

Dian Apriyanti, Kiki Endah, dan Budi Setiadi. 2019. *Pembinaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa Oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Ciamis*. Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan. Vol 5, No 3.

Eka Nurcahya. 2019. *Tugas Pemerintah dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Sosial: Tinjauan Mengenai Masalah Badan Usaha Milik Desa*. Resposive, Volume 2 No. 1 Mei 2019: 1-7.

Fajar Sidik, Fatih Gama Abisono N., dan Herawati. 2018. *Pemberdayaan Masyarakat Desa Menggunakan Badan Usaha Milik Desa: Desa Pongkok dan Kritik Terhadap Prestasi Terbaik Nasional*. Jurnal Pemikiran Sosiologi. Vol 5, No 2.

Ibrahim, Iwan Tanjung Sutarna, Ibrahim Abdullah, Kamaluddin, dan Mas'ad. 2019. *Faktor Penghambat Dan Pendukung Badan Usaha Milik Desa Pada Kawasan Pertambangan Emas Di Sumbawa Barat*. Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora. Universitas Muhammadiyah Mataram. Vol 21, No 3.

Titin Lestari. 2017. *Peran Pemerintahan Desa Terhadap Pembangunan Perekonomian Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mitra Usaha Mulya di Desa Marga Mulya Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu Tahun Tahun 2014-2015*. JOM FISIP. Vol. 4 No. 1.

Valentine Queen Chintary dan Asih Widi Lestari. 2016. *Peran Pemerintah Desa Dalam Mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Vol 5, No 2.

Referensi lain :

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Pedoman, Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Desa Sungai Buluh Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Sungai Buluh

DOKUMENTASI

Wawancara Peneliti dengan Narasumber/Key informan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

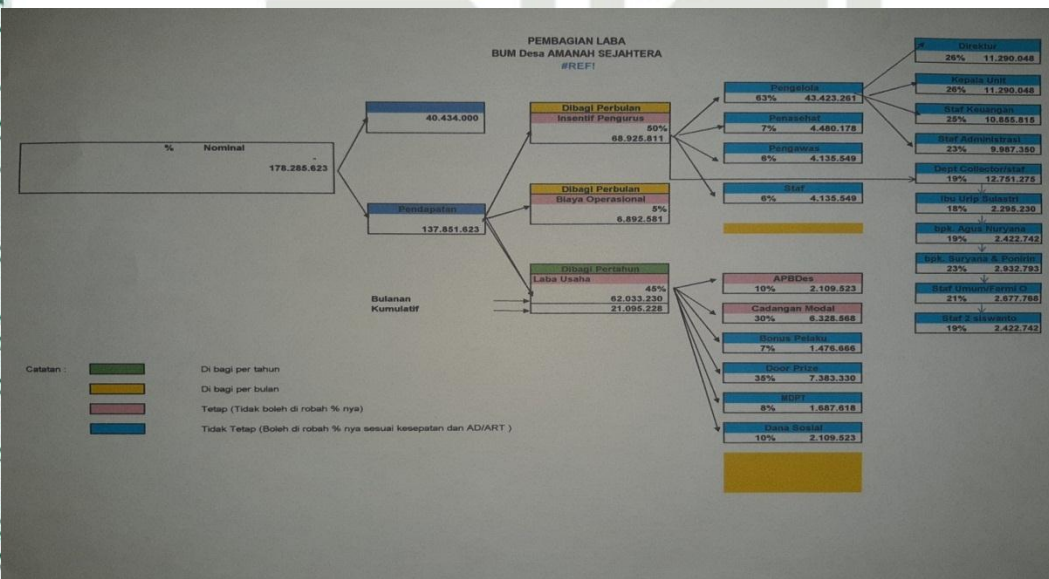
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Penerimaan Piagam Penghargaan di Bidang Eco-Agricuture



Doorprize Musyawarah Pertanggungjawaban Tahunan (MPTB) BUMDes Amanah Sejahtera Desa Sungai Buluh



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrandt No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/4262/2019
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Perihal : **Bimbingan Skripsi**

Pekanbaru, 04 Juli 2019 M
 1 Zulqaidah 1440 H

Kepada
 Yth. Muamar Alkadafi, S. Sos, M. Si
 Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : Syukran Tauby
 NIM : 11575100879
 Jurusan : Administrasi Negara
 Semester : VIII (Delapan)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: "**Peranan Pemerintah Daerah dalam Pembinaan Kelembagaan BUMDes di Kabupaten Kuantan Singingi**". Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudarasebagai pembimbingdalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,



Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
 NIP. 19620512 198903 1 003

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/4263/2019
Sifat : Biasa
Lampiran :
Hal : Izin Riset

Pekanbaru, 04 Juli 2019 M
1 Zulqaidah 1440 H

Kepada
Yth. Kepala Kantor
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Syukran Tauby
NIM. : 11575100879
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VIII (Delapan)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:
"Peranan Pemerintah Daerah dalam Pembinaan Kelembagaan Bumdes di
Kabupaten Kuantan Singingi" Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan
memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,



Dr. Drs. H. Muh. Saïd HM, M.Ag, MM
NIP. 19620512 198903 1 003

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/24296
 TENTANG



032010

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/4263/2019** Tanggal 4 Juli 2019, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : SYUKRAN TAUBY |
| 2. NIM / KTP | : 11575100879 |
| 3. Program Studi | : ADMINISTRASI NEGARA |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBINAAN KELEMBAGAAN BUMDES DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI |
| 7. Lokasi Penelitian | : DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 15 Juli 2019



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU**

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kuantan Singingi
3. Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Telukkuantan
4. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
5. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
Telepon (0760) 2524242 Fax (0760) 2524242 Kode Pos 29562
Email : dpmptsptk@kuansing.go.id, Website : https://dpmptsptk.kuansing.go.id
TELUK KUANTAN

REKOMENDASI

Nomor : 071/DPMPPTSPTK-PTSP/2019/284

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN TUGAS AKHIR**

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi, setelah membaca Surat Rekomendasi dari DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU Nomor:503/DPMPPTSPTK/NON IZIN-RISET/24296 Tanggal 15 JULI 2019.

Dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : **SYUKRAN TAUBY**
NIM : **11575100879**
Jurusan : **ADMINISTRASI NEGARA**
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UIN SUSKA RIAU
Jenjang Pendidikan : **S1**
Alamat : **PEKANBARU**
Judul Penelitian : **"PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBINAAN KELEMBAGAAN BUMDES DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI"**
Untuk melakukan Penelitian di : **DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset / pra riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan riset / pra riset dan pengumpulan data ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.
3. Hasil riset / pra riset dan pengumpulan data dilaporkan kepada Bupati Kuantan Singingi melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuantan Singingi.

Demikian rekomendasi ini diberikan agar digunakan sebagaimana mestinya, dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan riset / pra riset ini, dan terima kasih.

Dikeluarkan di : **Teluk Kuantan**
Pada Tanggal : **14 Agustus 2019**

Ditandatangani Secara Elektronik oleh :



**Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
Kabupaten Kuantan Singingi,**

MARDANSYAH,S.Sos.MM
Pembina IV.a
NIP 19750806200012 1 001

Tembusan : disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuantan Singingi di Teluk Kuantan;
2. Instansi terkait;
3. Arsip.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 KOMPLEKS PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
 Website: [https:// disospemdes.kuansing.go.id](https://disospemdes.kuansing.go.id)
 E-mail: @disospemdes.kuansing.go.id
TELUK KUANTAN

SURAT KETERANGAN

Nomor : 800/DISOSPMD-Sekr/733

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi dengan ini menerangkan bahwa :

NAMA : SYUKRAN TAUBY
NIM : 11575100879
JURUSAN : ADMINISTRASI NEGARA
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 UNIVERSITAS RIAU
JENJANG PENDIDIKAN : S1
ALAMAT : PEKANBARU
Judul Penelitian : PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBINAAN
 KELEMBAGAAN BUMDES DI KABUPATEN KUANTAN
 SINGINGI

Nama tersebut di atas benar telah melakukan penelitian dan pengambilan data yang diperlukan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi guna penulisan Proposal Skripsi yang berjudul : **"PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBINAAN KELEMBAGAAN BUMDES DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI"**.

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Teluk Kuantan, 05 Nopember 2019

Plt. KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
 DESA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,



Drs. NAPISMAN
 Pembina Tk. I

NIP. 19740202 200003 1 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Syukran Tauby yang dilahirkan di Muaralembu pada Tanggal 09 Juni 1997. Penulis merupakan anak ke 3 (tiga) dari empat bersaudara dari pasangan Ayahanda Darwin dan Ibunda Ramayana. Penulis telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar (SD) 002 Muaralembu pada Tahun 2009. Pada tahun itu juga penulis melanjutkan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Darul Iman yang sekarang bernama MTs Negeri 4 Kuantan Singingi dan menyelesaikan pada Tahun 2012. Tahun 2012, penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Singingi dan menyelesaikan pendidikan pada Tahun 2015. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan S1 di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan lulus di jalur pendaftaran SNMPTN pada Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Pada Tanggal 21 Juli 2020 penulis berhasil mendapatkan gelar Sarjana Administrasi Negara pada sidang Munaqasah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

UIN SUSKA RIAU